

**Evaluasi Pembangunan Toko Ritel Modern Di Sekitar Pasar Tradisional  
Di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba**



**AWITA NUSTAM  
E041201026**



**DEPARTEMEN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2024**

# **SKRIPSI**

## **Evaluasi Pembangunan Toko Ritel Modern Di Sekitar Pasar Tradisional Di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memenuhi Gelar Sarjana Ilmu Politik  
pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Hasanuddin



**DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH :**

**AWITA NUSTAM  
E041201026**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**Evaluasi Pembangunan Toko Ritel Modern Di Sekitar Pasar Tradisional  
Di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba**

Yang Diajukan oleh :

**Awita Nustam  
E041201026**


Telah Disetujui oleh :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



**Dr. Ariani Yunus, S.IP., M.Si.**  
NIP. 191107051998032002



**Ummi Suci Fathia Bailussy, S.IP., M.IP.**  
NIP. 19731122 200212 1 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik



**Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si.**  
NIP. 197912182008122002

**HALAMAN PENERIMAAN**

**SKRIPSI**

**Evaluasi Pembangunan Toko Ritel Modern Di Sekitar Pasar Tradisional  
Di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba**

Disusun dan Diajukan oleh :

**Awita Nustam**

**E041201026**

**Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Oleh Panitia Ujian Skripsi Pada  
Departemen Ilmu Politik**

**Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin**

Makassar, pada 7 Mei 2024

Menyetujui,

**Panitia Ujian**

Ketua : Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si. (.....)

Sekretaris : Ummi Suci Fathia Bailussy, S.IP., M.Si. (.....)

Anggota : Prof. Dr. Armin, M.Si. (.....)

Anggota : Andi Naharuddin, S.Ip., M.Si (.....)

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Evaluasi Pembangunan Toko Ritel Modern Di Sekitar Pasar Tradisional Di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing utama ibu Dr. Ariana Yunus, S.IP, M.Si. dan ibu Ummi Suci Fathia Bailussy, S.IP, M.Ip. karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin

Makassar, 7 Mei 2024



Yang Menyatakan,

Awita Nustam

NIM E041201026

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Evaluasi Pembangunan Toko Ritel Modern Di Sekitar Pasar Tradisional Di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta umat muslim yang mengikuti ajaran hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik pada program studi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karenanya kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat diharapkan oleh penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sehingga dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan rasa syukur dan terimakasih diiringi do'a kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua penulis (Almh) A. Nustan dan Hj. Syamsidar ibu yang saya sayangi sekali, yang telah mendidik, membesarkan, membimbing, mendoakan, memberikan dukungan, dorongan, dan pengertiannya kepada penulis untuk terus belajar demi menyelesaikan studi tanpa mengenal rasa lelah, pamrih, suka maupun duka untuk menggapai cita-cita. Kepada kakak penulis (Almh) Sahnur, S.P. dan Sahnar yang sangat saya sayangi yang memberikan motivasi kepada penulis untuk selalu semangat dan berjuang untuk menyelesaikan studi ini. Serta seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa mendukung dan memberikan perhatian yang baik selama penulis mengerjakan tugas akhir ini.

Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan kesempatan untuk dapat belajar berkembang di program studi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberikan pelayanan akademik dan administratif tingkat fakultas selama mengikuti perkuliahan sekaligus sebagai dosen pengajar;
3. Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si., selaku Ketua Departemen Program Studi Ilmu Politik, yang telah memberikan pelayanan akademik dan administrasi tingkat departemen sekaligus sebagai dosen pengajar;

4. Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si., sebagai pembimbing utama saya yang senantiasa membimbing dan mengarahkan saya untuk menyempurnakan penyusunan skripsi ini;
5. Ummi Suci Fathia Bailussy, S.IP., M.Ip., sebagai pembimbing kedua saya sekaligus penasihat akademik yang juga senantiasa membimbing dan mengarahkan saya untuk menyempurnakan penyusunan skripsi ini;
6. Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si., dan Andi Naharuddin, S.IP., M.Si., selaku penilai/penguji yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal sampai ujian skripsi;
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di jurusan Ilmu Politik;
8. Kepada seluruh tata usaha serta staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak membantu dalam kelancaran pembuatan surat-surat dan berbagai pelayanan administrasi lainnya;
9. Kepada organisasi Himapol FISIP Unhas sebagai tempat yang telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran baru untuk berkembang;
10. Kepada kak Ronal dan kak Irdan senior yang sangat saya hormati, yang telah banyak memberikan masukan dan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
11. Kepada teman-teman DINAMIS angkatan 2020 yang telah kebersamaan dari awal perkuliahan sampai akhir, yang telah memberikan banyak cerita dan pengalaman suka maupun duka;
12. Kepada sahabat aliansi, Lela, Fani, Marlin, dan Izza yang senantiasa menemani dan menyemangati saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
13. Kepada sobat KKN ku 7e berwibawa, yang telah menjadi tempat untuk menghibur diri, tempat yang selalu nyaman untuk datang, yang telah memberikan semangat untuk terus mengerjakan tugas akhir ini;
14. Kepada sobat Expost IPS 2 yang telah menemani dan memberikan semangat serta dukungan untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
15. Kepada always three ku, Finni Febi yang selalu memberikan tempat untuk menyembuhkan segala luka, tempat untuk merasakan kehangatan saudara dan tempat pulang;
16. Kepada Wana dan Febi yang telah menemani saya dalam proses penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
17. Kepada kak Hasdir yang telah memberikan dukungan, motivasi, semangat dan bantuan yang tak terduga;
18. Kepada seseorang yang sempat menjadi “rumah” yang tidak dapat saya sebutkan namanya, yang senantiasa selalu ada dan telah memberikan

..

saya banyak pelajaran dan perjuangan untuk terus maju dan menemani suka dan duka sampai hari ini.

Terimakasih penulis juga haturkan untuk semua pihak yang telah mebantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan tugas akhir. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan oleh penulis. Penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisinya. *Aamiin Allahumma aamiin.*

*Wassalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 7 Mei 2024



Penulis  
(Awita Nustam)



## **ABSTRAK**

**AWITA NUSTAM, NIM E041201026. EVALUASI PEMBANGUNAN TOKO RITEL MODERN DI SEKITAR PASAR TRADISIONAL DI DESA BONTOMANAI KECAMATAN RILAU ALE KABUPATEN BULUKUMBA DIBIMBING OLEH ARIANA DAN UMMI SUCI FATHIA BAILUSY**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil evaluasi kebijakan perizinan pembangunan toko ritel modern di sekitar pasar tradisional di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Metode. Dalam penelitian ini menggunakan perspektif kebijakan dan konsep evaluasi kebijakan. Perspektif kebijakan digunakan untuk menjelaskan dampak yang diperoleh, sementara konsep evaluasi kebijakan digunakan untuk memahami jenis evaluasi yang digunakan. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Hal tersebut dilakukan dengan melihat bahwa peneliti memperoleh informasi dengan mewawancarai informan terkait dan kemudian diabadikan dalam bentuk berupa dokumentasi sebagai bukti dari penelitian ini. Hasil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan toko modern di Desa Bontomanai dilihat dari perspektif kebijakan dan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai bagi masyarakat ini merupakan dampak positif. Hal tersebut seperti kenyamanan yang dirasakan oleh masyarakat saat berbelanja dan membuat Desa Bontomanai menjadi lebih berkembang. Namun bagi pelaku usaha di sekitar pasar tradisional dan pasar modern merasakan dampak negatif. Hal tersebut seperti berkurangnya pendapatan yang dihasilkan oleh para pelaku usaha. Evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah evaluasi semu. Dilakukan dengan metode pengumpulan data dan analisis data.

Kata kunci : Evaluasi, Kebijakan, Toko Modern.

## ABSTRACT

**AWITA NUSTAM, NIM E041201026. EVALUATION OF THE DEVELOPMENT OF A MODERN RETAIL SHOP AROUND THE TRADITIONAL MARKET IN BONTOMANAI VILLAGE, RILAU ALE DISTRICT, BULUKUMBA DISTRICT GUIDED BY ARIANA AND UMMI SUCI FATHIA BAILUSY**

*This research aims to determine the results of the evaluation of licensing policies for the construction of modern retail shops around traditional markets in Bontomanai Village, Rilau Ale District, Bulukumba Regency. Method. This research uses a policy perspective and the concept of policy evaluation. The policy perspective is used to explain the impact obtained, while the concept of policy evaluation is used to understand the type of evaluation used. The type of research used is qualitative research. The data collection techniques used were interview and documentation techniques. This was done by observing that the researcher obtained information by interviewing related informants and then immortalized it in the form of documentation as evidence of this research. Results. The results of this research show that the policy of building modern shops in Bontomanai Village, seen from a policy perspective and based on the goals to be achieved for this community, has a positive impact. It's like comfort felt by the community when shopping and making Bontomanai Village more developed. However, business actors around traditional markets and modern markets feel the negative impact. It's like reduction in income generated by business actors. Policy evaluation carried out by the government is a pseudo-evaluation. Carried out using data collection and data analysis methods.*

*Keyword : Evaluation, Policy, Modern Shop*

## Daftar Isi

HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENERIMAAN .....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	11
DAFTAR TABEL.....	12
BAB I.....	13
PENDAHULUAN.....	13
1.1. Latar Belakang.....	13
1.2. Rumusan Masalah.....	15
1.3. Tujuan Penelitian.....	15
1.4. Manfaat Penelitian.....	15
1.4.1. Manfaat Akademis .....	15
1.4.2. Manfaat Praktis .....	15
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1. Perspektif Kebijakan .....	16
2.2. Evaluasi Kebijakan.....	16
2.3. Penelitian Terdahulu .....	19
2.4. Kerangka Berfikir .....	20
2.5. Skema Pemikiran.....	22
BAB III.....	23
METODE PENELITIAN.....	23
3.1. Tipe dan Jenis Penelitian .....	23
3.2. Lokasi Penelitian .....	23
3.3. Jenis Data .....	24
3.3.1. Data Primer.....	24
3.3.2. Data Sekunder.....	24
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	24
3.4.1. Observasi.....	25
3.4.2. Wawancara .....	25
3.4.3. Dokumetasi.....	25
3.5. Teknik Analisis Data .....	25
3.5.1. Reduksi Data .....	26
3.5.2. Triangulasi Data.....	26
3.5.3. Penyajian Data .....	26
BAB IV .....	27

<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
4.1. Kabupaten Bulukumba .....	27
4.2. Desa Bontomanai .....	29
4.3. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba .....	30
<b>BAB V .....</b>	<b>32</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
5.1. Kebijakan Pembangunan Toko Ritel Modern di Sekitar Pasar Tradisional Kabupaten Bulukumba .....	32
5.1.1. Pasar Modern .....	33
5.1.2. Pasar Tradisional .....	37
5.2. Evaluasi Kebijakan .....	40
<b>BAB VI .....</b>	<b>45</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>45</b>
1.1. Kesimpulan .....	45
1.2. Saran .....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>48</b>
<b>Lampiran Dokumentasi Penelitian .....</b>	<b>50</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Administrasi Kab. Bulukumba .....	25
Gambar 2 Peta Administrasi Desa Bontomanai .....	28
Gambar 3 Toko Modern Desa Bontomanai (Toko Indomaret bersampingan dengan toko Alfamart).....	38
Gambar 4 Pasar Modern Desa Bontomanai (Toko Alfamart).....	38
Gambar 5 Pasar Tradisional Desa Bontomanai.....	44

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Desa Per Kecamatan Kab. Bulukumba Tahun 2022.....27

Tabel 2 Jumlah penduduk Desa Bontomanai Kab. Bulukumba.....29

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kebijakan merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik yang diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Menurut Anderson (dalam Hill and Hupe 2002) yang memahami kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.

Salah satu aspek dari tujuan kebijakan yakni dari aspek politik, dimana kebijakan ditentukan untuk mendistribusikan dan mengalokasikan nilai-nilai yang ada, yang mencakup barang dan jasa kepada seluruh bagian masyarakat. Dari sudut pandang kekuasaan, kebijakan dibuat agar pemerintah mampu mempertahankan monopoli atas masyarakat dan juga kewenangan pemerintah atau Negara dapat diterima dan diakui masyarakat.

Pembangunan infrastruktur sangat penting bagi suatu Negara karena bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Negara. Pembangunan infrastruktur dilakukan untuk memajukan daerah bahkan Negara karena dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur ini dapat menciptakan kemajuan dibidang ekonomi dan sosial di suatu daerah. Hal ini mengandung arti bahwa dalam setiap pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan harus ada pemerataan di setiap daerah. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Pembangunan toko ritel modern misalnya hingga saat ini pembangunannya sudah sangat pesat di Indonesia. Di kota besar bahkan di pelosok desa pun sudah sangat banyak dibangun. Toko ritel modern sering kali memiliki tampilan yang menarik, penyusunan produk yang terstruktur, dan fasilitas tambahan lainnya, seperti misalnya toko Indomaret dan Alfamart yang sudah tersebar diberbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari izin pembangunan serta kebijakan dari pemerintah setempat. Sebagai pemerintah yang membuat kebijakan, tentu perlu pertimbangan yang matang sebelum memutuskan suatu keputusan karena keputusan yang dibuat akan berpengaruh pada setiap masyarakat yang berdampak di daerah tersebut.

Umumnya disetiap daerah memiliki peraturan tentang toko ritel

modern tidak diperbolehkan dibangun di sekitar pasar tradisional, mengingat hal tersebut akan berdampak pada pendapatan masyarakat yang memiliki toko di dalam pasar tradisional bahkan toko-toko kecil yang beroperasi di sekitar toko modern tersebut, seperti Indomaret dan Alfamart.

Setiap daerah memiliki kebijakan yang berbeda-beda mengenai pembangunan toko ritel modern. Kebijakan tersebut dapat bervariasi tergantung pada kebijakan pemerintah daerah dan keadaan lokal daerah tersebut. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang mendukung pelestarian pasar tradisional sebagai pusat kegiatan ekonomi dan budaya lokal. Dalam hal ini, pembangunan toko modern di sekitar pasar tradisional mungkin dibatasi atau diatur dengan ketat untuk mempertahankan identitas pasar tradisional dan mempromosikan keberlanjutan usaha kecil dan menengah yang beroperasi di dalamnya.

Peraturan daerah yang terdapat di Kabupaten Bulukumba khususnya pada Nomor 10 Tahun 2015 tentang “Pemberdayaan Pasar Rakyat dan Pengaturan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern” pada pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa “dalam lokasi pasar rakyat tidak diperkenankan adanya pembangunan toko modern”, dalam pernyataan pasal tersebut jelas bahwa toko modern tidak diperbolehkan dibangun di sekitar pasar tradisional. Namun terdapat pula pernyataan pada pasal 7 ayat (7) huruf d yakni “toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dikecualikan untuk minimarket”, pada pasal 7 ayat (7) huruf c berbunyi “toko modern yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Kebijakan pemerintah yang terdapat dalam peraturan daerah Kabupaten Bulukumba ayat 7 ini kemudian diimplementasikan di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale, dimana di desa tersebut terdapat pasar tradisional yang telah lama berdiri dan menjadi pusat perbelanjaan warga Desa Bontomanai dan sekitarnya. Dengan jarak kurang lebih 500 meter dari pasar tersebut terdapat toko modern dengan kategori minimarket yakni Indomaret dan Alfamart yang dibangun saling bersampingan, tidak jauh dari jarak toko Alfamart ini kemudian terdapat pula toko Alfamart di desa yang masih sama yakni Desa Bontomanai.

Sejak setelah toko Indomaret dan Alfamart ini dibangun, kemudian warga Desa Bontomanai dan sekitarnya menjadikan toko tersebut sebagai pusat perbelanjaan produk-produk tertentu yang tersedia di dalamnya. Selain itu terdapat pula toko besar yang beroperasi di dekat toko Indomaret ini, yang kemudian menjadi pusat perbelanjaan pula bagi warga Desa Bontomanai dan sekitarnya, toko-toko kecil yang lebih dulu berjualan di



..

sekitar kawasan pasar tradisional itu pun menjadi sepi pelanggan bahkan terdapat pemilik toko yang gulung tikar diakibatkan oleh kurangnya pembeli. Untuk itu kebijakan atau peraturan yang diputuskan oleh pemerintah akan sangat berdampak terhadap masyarakat kedepannya.

Dari bentuk implementasi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba ini, kemudian dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai hasil implementasi dan evaluasi pembangunan pemerintah terhadap kebijakan pembangunan toko ritel modern di sekitar pasar tradisional.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dan berdasarkan latar belakang masalah serta luasnya cakupan judul, maka penulis membatasi dengan rumusan masalah “bagaimana evaluasi kebijakan pembangunan toko ritel modern di sekitar pasar tradisional Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba?”.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil evaluasi kebijakan perizinan pembangunan toko ritel modern di sekitar pasar tradisional di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis

### **1.4.1. Manfaat Akademis**

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan pendidikan khususnya ilmu politik.
2. Sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para pembaca untuk mengetahui bagaimana bentuk evaluasi kebijakan pemerintah Kabupaten Bulukumba terhadap kebijakan yang dibuat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas mengenai kerangka teori yang digunakan untuk penelitian yang akan dilakukan. Kemudian pada bab ini juga diuraikan tentang hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya.

#### **2.1. Perspektif Kebijakan**

Kebijakan merupakan suatu istilah yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan, definisi yang diberikan cukup beragam, dan dapat dipandang, baik secara luas maupun secara sempit, bergantung pihak yang berkepentingan terhadapnya. Derbyshire (dalam Samodra Wibawa, 1994 : 49) memberikan batasan terhadap *policy* sebagai sekumpulan rencana kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan efek perbaikan terhadap kondisi-kondisi sosial dan ekonomi. Rencana kegiatan tersebut merupakan produk akhir setiap pemerintahan dalam arti merupakan kesepakatan terakhir antara eksekutif dengan wakil rakyat (legislatif).

Hofferbert menyoroti kebijakan menjadi “hasil-hasil keputusan”, “pelaku” dan “tujuan-tujuan publik”. Pelaku yang dimaksud adalah legislatif, eksekutif dan siapapun yang hasil keputusannya untuk kepentingan orang banyak / masyarakat. Kemudian Hoffebert juga memahami kebijakan dari sisi substansi dan proses pelaksanaan kebijakan. Substansi kebijakan yaitu rumusan-rumusan kebijakan yang telah diputuskan dan tujuan-tujuan yang akan dicapai.

Kebijakan menekankan pada serangkaian aturan, panduan, atau langkah-langkah yang ditetapkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan perubahan atau mengarahkan tindakan dalam arah yang diinginkan. Kebijakan pemerintah seringkali diimplementasikan melalui undang-undang, peraturan, atau perintah eksekutif yang dirumuskan berdasarkan analisis kebutuhan, pemikiran strategis, dan pertimbangan politik.

#### **2.2. Evaluasi Kebijakan**

Michael Quin Patton (1978) yang menjelaskan bahwa penelitian evaluasi adalah aktivitas yang sistematis terkait dengan informasi dan dampak yang ditimbulkan dari sebuah program, yang nantinya akan dibuatkan penilaian spesifik terkait program yang dilaksanakan. Dari

beberapa pakar mengenai evaluasi juga mengungkapkan evaluasi adalah suatu proses penilaian yang sistematis dengan standar-standar prosedur yang telah ditetapkan untuk melihat bagaimana program maupun kebijakan dilaksanakan oleh para pembuat kebijakan, kemudian dari evaluasi akan memberikan hasil dan dampak dari program dan kebijakan tersebut yang bias digunakan pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan selanjutnya.

Evaluasi kebijakan memberikan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan yang sedang dan atau telah diterapkan, apakah mencapai tujuan yang ditetapkan dan sejauh mana kebijakan tersebut berhasil. Evaluasi kebijakan dapat membantu dalam mengidentifikasi kelemahan, mengukur efisiensi dan efektivitas program, menilai keadilan, dan memberikan informasi yang diperlukan untuk membuat perubahan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

Dalam bukunya Budi Winarno, Kebijakan Publik Teori dan Proses (2008) mengutip pernyataan Edward A. Sucman yaitu disisi lain lebih masuk ke sisi praktis dengan mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan.

1. Perumusan tujuan evaluasi

Tahap pertama adalah menentukan tujuan evaluasi kebijakan yang jelas. Ini melibatkan identifikasi apa yang ingin dicapai melalui evaluasi, seperti memahami dampak kebijakan atau mengevaluasi efektivitasnya.

2. Perencanaan evaluasi

Langkah kedua adalah merencanakan evaluasi. Ini termasuk menentukan metode penelitian yang akan digunakan, sumber daya yang diperlukan, serta jadwal pelaksanaan evaluasi.

3. Pengembangan kriteria dan indikator

Membuat kriteria dan indikator yang akan digunakan untuk menilai kebijakan. Kriteria ini harus sesuai dengan tujuan evaluasi yang telah ditentukan sebelumnya.

4. Pengumpulan data

Selanjutnya, data relevan dikumpulkan sesuai dengan metode yang telah direncanakan. Data ini dapat mencakup informasi tentang pelaksanaan kebijakan, dampaknya, dan lain-lain.

5. Analisis data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk menilai sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang ditetapkan. Ini melibatkan perbandingan antara data yang ditemukan dengan kriteria dan indikator yang telah dibuat.

## 6. Pelaporan dan penggunaan hasil

Hasil evaluasi kemudian dilaporkan kepada pemangku kepentingan yang relevan. Hasil ini dapat digunakan untuk membuat keputusan tentang kebijakan yang ada, perbaikan, atau perubahan kebijakan di masa depan.

Ini merupakan ringkasan singkat dari enam langkah dalam model evaluasi Sucham yang digunakan untuk mengevaluasi kebijakan. Setiap langkah memainkan peran penting dalam memastikan evaluasi kebijakan yang efektif.

Dalam perkembangannya studi evaluasi kebijakan melahirkan beberapa pendekatan-pendekatan seperti yang diungkapkan oleh William Dunn (2003), pendekatan-pendekatan tersebut antara lain evaluasi semu, evaluasi formal dan evaluasi teoritis keputusan.

### 1) Evaluasi Semu

(*Pseude Evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri (*self evident*) atau tidak kontroversial.

### 2) Evaluasi Formal

(*Formal Evaluation*) merupakan pendekatan menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijaksanaan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dari target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program. Dari segi metode evaluasi formal menggunakan metode yang sama dengan evaluasi semu. Perbedaannya dengan evaluasi semu ialah bahwa evaluasi formal menggunakan undang-undang dokumen program, dan wawancara dengan pembuat kebijakan dan administrator untuk mengidentifikasi, mendefinisikan dan menspesifikasikan tujuan dan target kebijakan.

### 3) Evaluasi Keputusan Teoritis

(*Decision-Theoretic Evaluation*) adalah pendekatan dengan menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil

kebijakan secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Perbedaan pokok antara evaluasi teoritis keputusan disatu sisi, dan evaluasi semu dan evaluasi formal di sisi lainnya, adalah bahwa evaluasi keputusan teoritis berusaha untuk memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari pelaku kebijakan baik yang tersembunyi atau yang dinyatakan.

### **2.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah suatu acuan peneliti untuk membandingkan peneliti dengan hasil penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Penelitian terdahulu menjelaskan tentang beberapa hasil penelitian sebelumnya namun memiliki kesamaan tema yang oleh peneliti. Berikut merupakan penelitian-penelitian yang terkait dengan judul penulis:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Diana Djuwita dengan judul “Evaluasi Tata Letak Pasar Modern Di Kota Cirebon “Kajian Evaluasi Peraturan Walikota Cirebon No. 23 Tahun 2010)”. Adapun hasil penelitian ini adalah peraturan Walikota Cirebon No. 23 Tahun 2010 Pasal 8 belum sepenuhnya dijalankan atau diimplementasikan dengan baik oleh para pelaku pasar maupun pihak pemerintah. Hal ini terlihat banyaknya minimarket (33 buah) yang berdiri dan beroperasi tanpa izin, tapi belum ada tindakan yang tegas dari pemerintah Kota Cirebon. Hal lainnya adalah perkembangan toko modern di Kota Cirebon sangat pesat, tapi belum tertata dengan rapi sehingga masih dijumpai pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern yang terkonsentrasi di satu kawasan atau jalan dengan jarak yang sangat berdekatan sehingga iklim persaingan menjadi tidak sehat. Artinya Perwali Kota Cirebon 23/2010 belum efektif mengatur penataan pasar.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Moh Irham Triyuda yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Penataan Usaha Toko Modern Dan Minimarket “Studi Evaluasi Perda Surabaya No. 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan Di Kota Surabaya)”. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 tentang penataan toko swalayan di Kota Surabaya tidak cukup memberikan penyelesaian masalah terutama bagi usaha tradisional dan usaha toko kelontong masyarakat. Dengan semakin mudahnya pengusaha toko modern dan minimarket untuk mendapatkan permohonan IUTS berpotensi menyebabkan penambahan minimarket yang semakin besar sehingga dapat mengganggu eksistensi usaha tradisional dan toko kelontong milik masyarakat. Selain itu juga terkait dengan lokasi pendirian

..

toko modern dan minimarket yang belum sesuai persyaratan maka Disperdagin tidak serta merta menutup usaha tersebut karena pengusaha yang bernegosiasi untuk meminta waktu hingga 2,5 tahun sampai menunggu balik modal.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Pranata yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Perizinan Mini Market di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017”. Adapun hasil dari penelitian ini adalah penegakan aturan zonasi dan ketersediaan lahan parker belum sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013, dikarenakan belum adanya acuan sebagai dasar dan pembagian wilayah ataupun zonasi yang jelas maka keberadaannya belum tertata dengan baik penzonasiannya. Ditambah dengan masalah lahan parkir yang dirasa masih cukup kurang.

Dari ketiga penelitian tersebut memiliki relevansi yang terkait dengan penelitian ini yang secara umum menjelaskan terkait evaluasi kebijakan mengenai pembangunan toko ritel modern dan pasar tradisional.

#### **2.4. Kerangka Berfikir**

Kebijakan pembangunan toko ritel modern adalah kebijakan yang bertujuan untuk memfasilitasi dan mendorong pembangunan toko-toko ritel modern sebagai alternatif atau pelengkap bagi toko-toko atau pasar tradisional. Kebijakan ini seringkali dilakukan untuk memperbaiki infrastruktur ritel, mendorong investasi swasta dalam sektor ritel, dan meningkatkan aksesibilitas barang dan layanan bagi masyarakat.

Kebijakan yang mengatur tentang pemberdayaan pasar tradisional dan toko modern yang tertera dalam peraturan daerah Kabupaten Bulukumba yakni Nomor 10 Tahun 2015 tentang “Pemberdayaan Pasar Rakyat dan Pengaturan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern” pada pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa “dalam lokasi pasar rakyat tidak diperkenankan adanya pembangunan toko modern”, terdapat pula pernyataan pada pasal 7 ayat (7) huruf d yakni “toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dikecualikan untuk minimarket”, pada pasal 7 ayat (7) huruf c berbunyi “toko modern yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Kemudian peraturan tersebut salah satunya diimplementasikan di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba sejak tahun 2015. Dalam pasal tersebut mengatur tentang toko modern dilarang dibangun terintegrasi dengan pasar tradisional, namun pada pasal selanjutnya mempertegas bahwa toko modern dengan jenis

..

minimarket dalam hal ini adalah Indomaret dan Alfamart itu dapat dibangun di sekitar pasar tradisional. Hal tersebut mempertegas bahwa toko modern minimarket memiliki izin khusus untuk dibangun dimana saja bahkan di dekat pasar tradisional sekalipun. Namun, pembangunan toko modern di Desa Bontomanai menjadi tidak efektif disebabkan oleh jarak pembangunan yang sangat dekat, toko indomaret dan toko alfamart dibangun secara bersampingan dan terintegrasi dengan pasar tradisional. Sehingga hal tersebut mempengaruhi pendapatan pedagang toko kecil yang sudah lama berdiri dan beroperasi di sekitar pasar tradisional maupun di sekitar pasar modern.

## 2.5. Skema Pemikiran

